

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara global satu dari tujuh remaja awal mengalami gangguan kesehatan mental di 204 negara (Fan et al., 2025). Di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan sebagian Asia Tenggara menjadi negara dengan tingkat *mental health* remaja yang tinggi. Namun, banyak remaja yang tidak mencari pertolongan ataupun berobat karena takut dianggap lemah dan tidak normal, sehingga masalah ini menjadi lebih parah sampai masuk ke tahap kronis. Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi kesehatan mental dalam keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan keluhan remaja sering dianggap sebagai masalah perilaku atau kurang disiplin dan bukan gejala gangguan psikologis (UNICEF, 2021). Masalah kesehatan mental mempengaruhi 10–20% anak-anak dan remaja di seluruh dunia dan menyumbang 15–30% dari *Disability Adjusted Life Year* (DALYs) dalam tiga dekade pertama kehidupan (Dray et al., 2021).

Kesehatan mental menjadi bagian penting dalam mendukung kondisi kesehatan serta kesejahteraan seseorang. Kesehatan mental menjadi pondasi dasar bagi seseorang dalam merasa, berpikir, belajar, bekerja, membangun hubungan yang substansial serta berkontribusi secara global. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengkategorikan *mental health* kedalam beberapa kondisi seperti kecemasan, depresi, *panic attack*, dan stress. Menurut UNICEF kesehatan mental

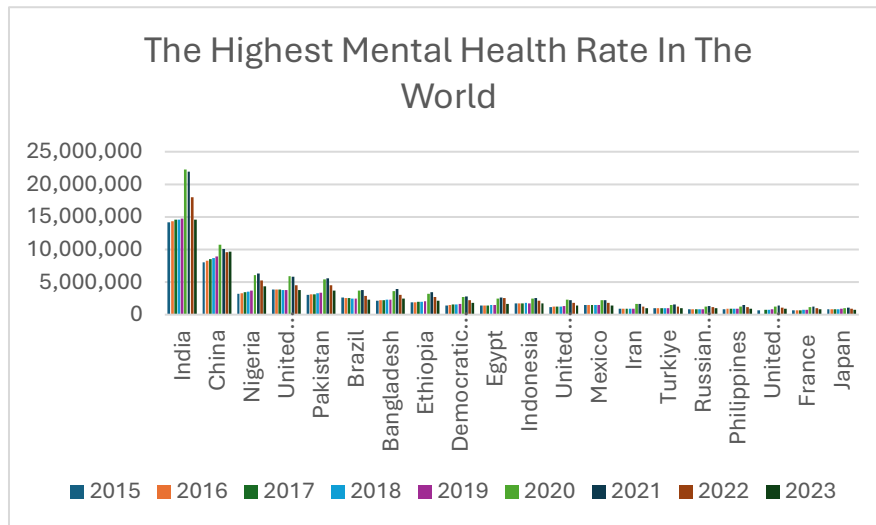
dapat diajarkan kepada anak-anak dari umur 0-5, dimana umur tersebut menjadi awal masa pertumbuhan seseorang (UNICEF Indonesia, 2022).

Menurut WHO, remaja awal dikategorikan berusia 10-19 tahun yang sedang dalam masa pembentukan karakter. Pada masa ini remaja rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena terjadi perubahan fisik, emosional, sosial serta pengaruh kondisi lingkungan (WHO, 2025). Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya diskriminasi, tekanan akademik, kekerasan atau *bullying*, kemiskinan, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental, terutama di negara berpendapatan rendah (WHO, 2025).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah kesehatan mental remaja yang masuk dalam kategori tertinggi secara global. Menurut *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS)*, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah *mental health*, sementara 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental dalam satu tahun terakhir (Wahdi E. A. et al., 2022). Data dari I-NAMHS tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental, dan sekitar 5,5% terdiagnosis gangguan mental klinis dalam 12 bulan terakhir. Tingginya angka tersebut menandakan bahwa pemulihan kesehatan mental remaja ternyata tidak secepat pemulihan kondisi fisik pascapandemi, sehingga diperlukan perhatian khusus dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk penanganan berkelanjutan (Chairani et al., 2023)

Pada tanggal 29 April 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan PT Telkom meluncurkan Layanan Kesehatan Jiwa (SEJIWA). Layanan ini diluncurkan untuk membantu penanganan kesehatan mental masyarakat terutama remaja (Kemenppa, 2021). Dilaporkan jika rata-rata pengguna layanan ini merupakan remaja yang memiliki emosi negatif serta orang-orang dengan usia produktif. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan emosi negatif sebagai penyebab penurunan kemampuan (Bayu, 2020).

Tahun 2021 bertepatan dengan peringatan hari kesehatan jiwa sedunia bertemakan "*Mental Health in an Unequal World : Kesetaraan dalam Kesehatan Jiwa untuk Semua*". Untuk memperingati hari kesehatan jiwa tersebut pemerintah mengadakan lomba poster dan video bersama dengan Asosiasi RS Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSAWAKOI), webinar kesehatan jiwa, audiensi pejabat daerah dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta talkshow di stasiun TV dan radio nasional. Rangkaian acara yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan dukungan dan memperbaiki stigma-stigma negatif yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami permasalahan kesehatan jiwa.



Gambar 1. 1 *The Highest Mental Health Rate in The World 2015-2023*

Sumber : *Institute for Health Metrics and Evaluation* (Diolah oleh penulis)

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2015 jumlah kesehatan mental remaja Indonesia mencapai 1.755.475 kasus, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 1.735.631 kasus pada tahun 2016. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 1.766.231 kasus dan selanjutnya bertambah pada sebanyak 1.773.706 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah kasus kesehatan mental remaja menurun menjadi 1.760.896, tetapi angka tersebut masih menunjukkan beban yang tinggi dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa masalah kesehatan mental tetap menjadi isu nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya komprehensif dalam peningkatan layanan kesehatan jiwa, penguatan deteksi dini, dan pengurangan stigma agar penanganan masalah kesehatan mental lebih efektif.

Pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi ke- 11, di antara negara-negara lain seperti, India, China, Nigeria, USA, Pakistan, Brazil, Bangladesh, Ethiopia, Republik Kongo, dan Egypt. Indonesia juga bertahan menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan kasus *adolescent mental health* tertinggi diantara 15 dengan negara lain. Jumlah kasus mencapai angka 2.492.653, yang dialami baik remaja laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah tersebut mengalami kenaikan menjadi 2.601.955 dan menempati posisi ke-10. Angka tersebut menunjukkan kenaikan kasus *mental health* sebesar 4,39% atau 109.342 oleh remaja di Indonesia.

Pada tahun 2022, Indonesia masih menempati posisi ke- 10 negara dengan *mental health* remaja tertinggi. Meskipun berada di urutan yang sama dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah kasus *mental health* remaja dari yang sebelumnya 2.601.995 kasus menjadi 2.108.032 kasus yang dialami remaja laki-laki dan perempuan. Jumlah kasus tersebut menunjukkan penurunan sebesar 18,98% atau 493.963 kasus dalam jangka waktu satu tahun. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, tahun 2022 menunjukkan mulai menurunnya kasus *mental health* remaja di Indonesia. Jumlah penderita *mental health* pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 18, 82% atau 396.656 dari yang sebelumnya 2.108.032 menjadi 1.711.373 kasus. Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, maka tahun ini menjadi tahun dengan kasus *mental health* remaja paling rendah di Indonesia.

Di rentang waktu 2020-2023 UNICEF berfokus dalam menangani permasalahan *mental health* remaja dengan membuat program-program penanganan akibat adanya kenaikan jumlah kasus *mental health* remaja, dimana pada tahun-tahun sebelumnya UNICEF tidak berfokus menginisiasi program *mental health* tersebut. Dalam menjawab tantangan tersebut UNICEF sebagai salah satu organisasi Internasional yang melakukan perlindungan bagi anak-anak dan remaja berupaya UNICEF menjalankan intervensi dengan melakukan implementasi *monitoring*, *capacity buiding* dan *problem solving* di Indonesia tahun 2020-2023.

Penelitian ini berfokus pada implementasi *monitoring* dan *capacity building* dan *problem solving* yang diinisiasi oleh UNICEF untuk menangani *mental health* remaja di Indonesia tahun 2020-2023. Penelitian ini ditulis dengan mengkaji dan membandingkan penelitian sebelumnya untuk meneliti kebaruaran hasil yang ditulis dalam penelitian ini. Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama berjudul Kerja Sama *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dengan *Center For Indonesian Medical Student's Activities* (CIMSAs) Dalam Mengkampanyekan Isu Kesehatan Mental Di Indonesia yang ditulis oleh Ramadhani dan Olivia pada tahun 2023. Penelitian ini membahas upaya UNICEF dan CIMSAs untuk mengatasi kesehatan mental remaja dengan memberdayakan dan memberikan dukungan remaja di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dan CIMSAs menjadi keberlanjutan kerjasama yang

sebelumnya dilakukan bersama pemerintah sebelum Covid-19, sehingga saat terjadi Covid-19 UNICEF memutuskan untuk berkolaborasi dengan CIMSA untuk mencapai keberhasilan program yang dibuat (Ramadhani & Olivia, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang berlangsung terlihat pada objek penelitiannya dimana penelitian tersebut berfokus pada kerjasama UNICEF dan CIMSA dalam menangani kesehatan mental remaja (15-24 tahun) di wilayah Jakarta dan Yogyakarta sedangkan penelitian yang berlangsung berfokus pada implementasi UNICEF dalam menangani kesehatan mental remaja remaja (10-19 tahun) di Indonesia.

Penelitian kedua berjudul Upaya UNICEF Dalam Mengatasi Kesehatan Mental Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Studi Kasus: Generasi Z) oleh Wandani tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya kampanye digital UNICEF untuk menangani kesehatan mental remaja (Gen Z), akibat adanya Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program UNICEF berdampak bagi remaja (Gen Z) untuk memahami urgensi serta penanganan lebih lanjut terkait kesehatan mental akibat Covid-19 (Wandany, 2025). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang berlangsung terdapat pada implementasi program yang dilakukan UNICEF. Dalam penelitian yang berlangsung penulis tidak hanya membahas implementasi program UNICEF yang dilakukan secara daring (digital) tetapi juga implementasi program secara langsung (offline) dalam rentang waktu 2020-2023 di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka diperoleh rumusan masalah “Bagaimana Implementasi UNICEF Dalam Menangani Kasus *Mental Health* Remaja di Indonesia Tahun 2020-2023?”.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna mendapat gelar S1 prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *monitoring, capacity building* dan *problem solving* yang dilakukan oleh UNICEF untuk menangani kasus *mental health* remaja di Indonesia tahun 2020-2023

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 *Mental Health*

Mental Health dapat didefinisikan ke dalam tiga kategori seperti ketiadaan penyakit, keadaan organisme yang berfungsi penuh terhadap kinerja diri dan keadaan keseimbangan diri sendiri dengan lingkungan sosial. Ketiga definisi

tersebut didasarkan pada tingkat terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar. Kondisi kesehatan mental menunjukkan jika seseorang memiliki kemampuan dalam membentuk dan mempertahankan rasa kasih sayang dengan individu lainnya. Hal ini merupakan bagian dari peran sosial untuk mengelola perubahan, mengenali, mengakui dan mengkomunikasikan tindakan atau emosi (Bhugra, 2013).

Kesehatan mental bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit mental dan diterima secara universal, sedangkan kesetaraan antara kesehatan mental dan kesejahteraan tidak diterima secara universal sehingga dibuat definisi yang sesuai dengan berbagai kondisi emosional. Definisi yang dibuat adalah kesehatan mental merupakan kondisi dinamis dari keseimbangan internal yang memungkinkan individu menggunakan kemampuannya sesuai dengan nilai-nilai universal masyarakat. Komponen penting dalam kesehatan mental terhadap kondisi keseimbangan internal yaitu keterampilan kognitif dan sosial dasar, kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosi sendiri, empati dengan orang lain, fleksibilitas dan kemampuan untuk menghadapi peristiwa hidup yang merugikan dan menjalankan peran sosial, serta hubungan harmonis antara tubuh dan pikiran dalam tingkat yang berbeda-beda (Galderisi et al., 2025).

1.5.2 Implementasi Organisasi Internasional

Era globalisasi menunjukkan berakhirnya perang dingin dan menjadikan eksistensi Organisasi Internasional (OI) kembali dipertimbangkan oleh ahli hubungan internasional. OI tidak hanya dipandang sebagai perpanjangan negara atau arena membangun koalisi kemenangan tetapi juga aktor mandiri yang

memainkan peran politik global. OI berperan dalam proses implementasi dan pengambilan keputusan politik global. Studi terbaru menunjukkan jika OI dapat menetapkan agenda, mengadili, mengajar serta memengaruhi proses pengambilan keputusan (Joachim et al., 2007).

Aspek	Enforcement Approach	Management Approach	Normative Approach
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, yaitu penilaian berdasarkan laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO • <i>Sanctions</i>, misalnya sanksi ekonomi atau militer, ajudikasi, penalti finansial, atau <i>naming and shaming</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> berdasarkan laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO • <i>Capacity building and problem solving</i> melalui nasihat ahli, interpretasi aturan, bantuan finansial atau teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i>

Tabel 1. Implementation Approaches

Sumber : *International Organizations and Implementation* (Diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat tiga pendekatan organisasi internasional dan implementasi kebijakan dalam tingkat domestik seperti *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*. Dalam penelitian yang ditulis, peneliti menggunakan satu pendekatan organisasi internasional dan implementasi kebijakan, yaitu *management approach* untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi organisasi internasional yang diteliti penulis.

Pendekatan ini digunakan karena telah sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh organisasi internasional yang dikaji saat ini. *Enforcement approach* merupakan pendekatan yang bersifat memaksa dan menggunakan sanksi, *naming and shaming* serta *normative approach* yang sifatnya persuasif dan menggunakan legitimasi sebagai alat implementasi kebijakan dianggap tidak sesuai dengan pendekatan organisasi internasional yang dikaji (Joachim et al., 2007).

Keterkaitan antara isu kesehatan mental dan implementasi oleh organisasi internasional merupakan permasalahan bersifat global serta memiliki dampak luas terhadap pembangunan sosial serta kualitas sumber daya manusia di berbagai negara. Dalam kondisi tersebut, organisasi internasional berperan penting sebagai pembentuk dan penyebar norma global sekaligus sebagai aktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional melalui implementasi OI. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kesehatan mental di tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh keterlibatan organisasi internasional yang menghubungkan norma global dengan praktik kebijakan di dalam negeri (Joachim et al., 2007).

1.5.2.1 Management Approach

Management approach merupakan salah satu pendekatan yang menekankan bahwa negara sering kali gagal memenuhi komitmen internasional bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena keterbatasan kapasitas, sumber daya, atau masih adanya ketidakjelasan dalam aturan yang harus diimplementasikan. Pendekatan ini memandang proses implementasi sebagai kerja sama yang bersifat *problem solving* daripada mekanisme kontrol dan hukuman. Dalam pendekatan manajemen,

organisasi internasional berperan membantu negara melalui peningkatan kapasitas, baik melalui bantuan teknis, pelatihan, penyediaan ahli, maupun dukungan finansial yang dapat memperbaiki kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya (Joachim et al., 2007).

Selain itu, OI memberikan interpretasi terhadap aturan yang ambigu agar negara memahami secara tepat bagaimana menginterpretasikan komitmen internasional ke kebijakan nasional. Transparansi juga menjadi elemen penting dalam pendekatan ini dimana mekanisme pelaporan, pertukaran data, dan konsultasi terbuka difungsikan untuk memfasilitasi proses belajar dan memperbaiki implementasi secara berkelanjutan. *Management approach* memposisikan OI bukan sebagai aktor yang menghukum, tetapi sebagai mitra yang membantu negara mengatasi hambatan implementasi melalui dialog, koordinasi, dan penguatan kapasitas secara kolaboratif. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk organisasi yang tidak memiliki kekuatan sanksi formal karena lebih mengandalkan keahlian teknis, dukungan operasional, dan hubungan kerja sama untuk memastikan negara dapat melaksanakan komitmen global secara efektif (Joachim et al., 2007).

1.5.2.1.1 *Monitoring*

Monitoring merupakan proses pemantauan secara terus-menerus untuk melihat perkembangan suatu program atau kegiatan serta memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Monitoring* berfungsi untuk memastikan transparansi, mengidentifikasi hambatan

implementasi, serta menyediakan dasar bagi dialog antara organisasi internasional dan negara anggota (Joachim et al., 2007).

Tahap awal *monitoring* dimulai dari perencanaan, yaitu penetapan tujuan, indikator kinerja, sumber data, serta mekanisme pelaporan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data secara periodik melalui berbagai instrumen seperti laporan kegiatan, dokumentasi organisasi, atau observasi pelaksanaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dinilai untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian target, deviasi pelaksanaan, serta permasalahan yang muncul. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan *monitoring* yang berisi temuan utama dan rekomendasi, serta pada tahap akhir dilakukan tindak lanjut, di mana hasil *monitoring* digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan pelaksanaan, dan pembelajaran organisasi agar implementasi ke depan menjadi lebih efektif dan akuntabel (Reynolds & Sutherland, 2013).

Monitoring dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti laporan-laporan negara (*state reporting*), *expert committees evaluation*, inspeksi dan laporan dari *Non Governmental Organization (NGO)*. laporan negara dilakukan oleh negara dengan menyampaikan laporan berkala mengenai langkah implementasi yang telah dilakukan. Laporan ini kemudian dievaluasi oleh organisasi internasional untuk menilai kompetensi tindakan domestik (Joachim et al., 2007).

Expert committees evaluation merupakan metode evaluasi yang melibatkan para pakar atau ahli independen untuk menilai pelaksanaan dan hasil suatu program secara sistematis. Dalam penelitian dan perencanaan program, keterlibatan panel

ahli digunakan untuk memvalidasi indikator, menilai relevansi strategi, serta memberikan umpan balik teknis untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program sehingga pendekatan seperti ini semakin diakui sebagai bagian penting dari metodologi evaluasi yang kredibel dan sistematis (Waltz et al., 2015).

Untuk memastikan informasi yang lebih akurat, organisasi internasional juga memanfaatkan *shadow reports* dari organisasi non pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, yang berfungsi melengkapi atau mengoreksi laporan resmi pemerintah (Joachim et al., 2007). Data yang dihasilkan oleh INGO seringkali digunakan sebagai bahan *secondary analysis* dalam penelitian evaluasi program yang lebih luas, misalnya untuk mengevaluasi efektivitas layanan atau intervensi kesehatan dan menilai kebutuhan kelompok marginal yang biasanya tidak terjangkau oleh data nasional. Analisis sekunder ini dapat memberikan pemahaman tentang pencapaian hasil, memfasilitasi pembelajaran institusional, dan mendukung advokasi berbasis bukti guna meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan program (Masefield et al., 2020).

1.5.2.1.2 Capacity Building & Problem Solving

Capacity building adalah proses meningkatkan kemampuan aktor (negara institusi domestik, masyarakat) agar mampu berperan secara efektif dan berkelanjutan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Organisasi internasional berperan penting dalam pelaksanaan *capacity building* melalui

pemberian sumber daya seperti pelatihan, akses informasi, dan penghubung organisasi lokal ke tingkat global.

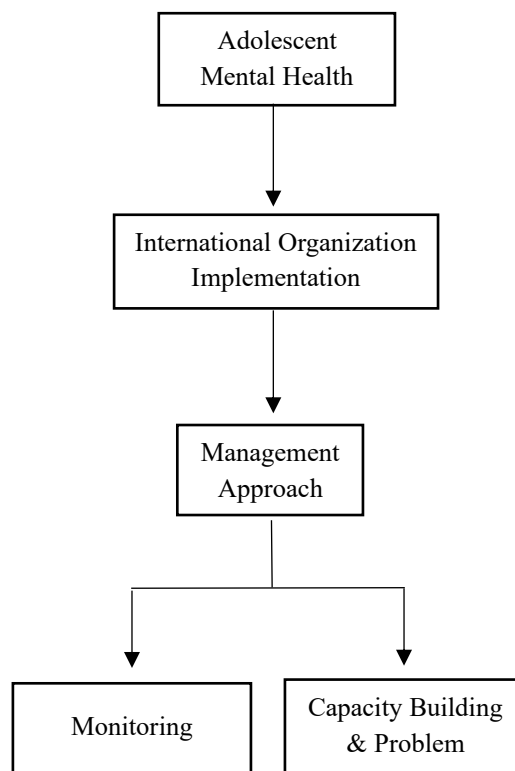
Problem solving dipahami sebagai upaya aktor internasional untuk membantu negara menghadapi suatu masalah dengan menyediakan solusi yang bersifat praktis dan berbasis keahlian. Melalui *problem solving*, organisasi internasional tidak hanya menyampaikan tuntutan normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana suatu masalah dapat ditangani secara konkret, sehingga meningkatkan kepercayaan dan penerimaan negara terhadap intervensi yang ditawarkan. *Capacity building* dan *problem solving* dilakukan melalui pemberian *financial assistance*, *technical assistance*, *advocacy* dan *campaign* (Joachim et al., 2007).

Financial assistance merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional. Implementasi *financial assistance* dapat dilakukan melalui *financial resources* yang didapatkan dari regional, bilateral dan saluran internasional. Organisasi internasional memberikan *financial assistance* berbagai tahap, kesesuaian kriteria dan prosedur pengajuan (Pallemaerts & Armstrong, 2009). *Technical assistance* merupakan salah satu aktivitas yang melibatkan pemerintah dengan menyesuaikan strategi. Kegiatan dalam *technical assistance* berupa pelatihan, pemberian saran, data, informasi, dan peningkatan kapasitas (Stadelmann & Falconer, 2015).

Advocacy merupakan fungsi inti organisasi internasional yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik serta mendorong perubahan sosial.

advokasi dilakukan melalui berbagai strategi seperti *policy advocacy* dengan menyusun rekomendasi berbasis data dan penelitian, *lobbying* melalui interaksi langsung dengan pembuat kebijakan sebagai *insider strategy* dan kampanye yang berfungsi untuk memobilisasi dukungan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membentuk opini yang dapat menciptakan tekanan sosial terhadap pengambil kebijakan sebagai *outside strategy* (Mosley et al., 2020).

1.6 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan teori yang telah diuraikan tersebut, maka sintesa pemikiran penelitian ini adalah bagaimana implementasi *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* oleh organisasi internasional dalam menangani masalah. Dalam mengatasi isu tersebut penulis menggunakan teori implementasi organisasi internasional melalui *management approach*. Pendekatan ini terbagi menjadi indikator *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* untuk menganalisis implementasi organisasi internasional melalui program-program yang dilakukan dalam menangani fokus utama permasalahan yang terjadi.

1.7 Argumen Utama

Implementasi UNICEF dilakukan dengan menerapkan *managerial approach* yang meliputi *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving*. Bentuk implementasi *monitoring* UNICEF dilakukan melalui survei *U-Report* terhadap remaja untuk mengetahui kondisi kesehatan mentalnya. Selain itu, *monitoring* UNICEF dilakukan bersama Kemenkes melalui Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja untuk mengidentifikasi praktik partisipasi remaja serta Survei Kesehatan Indonesia untuk membuat laporan tahunan UNICEF. *Monitoring* UNICEF juga dilakukan bersama INGO melalui Proyek *Changing Childhood* untuk mengintegrasikan kesehatan mental melalui layanan dasar Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKMP). Selain itu, *monitoring* UNICEF dilakukan bersama *expert committees* melalui *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) untuk mengidentifikasi isu kesehatan mental dan rendahnya akses layanan kesehatan mental.

Dalam implementasi *capacity building* UNICEF mendukung pemerintah dalam merancang program untuk pesantren dan sekolah melalui Pesantren Ramah Anak, *Respect Ourselves and Others to Stop Bullying* (Roots) serta Generasi Berencana (GenRe). Dalam implementasi *problem solving* UNICEF melakukan kolaborasi dengan Accenture Indonesia dalam inisiatif *#ForEveryChild* untuk anak-anak yang kehilangan orang tua saat COVID-19 dan pekerja sosial yang terdampak dengan menyediakan bantuan psikososial, perlengkapan bermain dan *psychosocial kit*. UNICEF juga memberikan keahlian teknis kepada otoritas nasional untuk meningkatkan pedoman, standar dan modul pelatihan *mental health and psychosocial support* (MHPSS) untuk pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA). Advokasi UNICEF dilakukan dengan inisiatif isu-isu kehidupan (Ruang PEKA) bersama CIMSA yang melibatkan remaja sebagai *audience*, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Indra Sugiarto (pendiri Masukkampus dan penulis tiga buku sebagai narasumber). Selain itu, *problem solving* UNICEF dilakukan bersama *influencer* dengan kampanye digital *#COVID19Diaries* di Instagram dengan membagikan pengalaman para remaja selama COVID-19 untuk mendukung campaign *child right advocacy* dan peningkatan *awareness*.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap variabel independen tanpa adanya perbandingan dengan variabel yang

lain. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan secara tepat karakteristik individu, kondisi, gejala, kelompok tertentu atau mengetahui frekuensi dan distribusi suatu gejala (Abubakar, 2021). Penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk menjelaskan Implementasi UNICEF dalam menangani *mental health* remaja di Indonesia tahun 2020-2023.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Peneliti mengambil jangka waktu tahun 2020-2023 dikarenakan pada jangka waktu tersebut UNICEF telah berfokus dalam penanganan kesehatan mental remaja. Peneliti melakukan batas penelitian di tahun 2020 dikarenakan terdapat peningkatan *mental health* remaja yang tinggi dari 5 tahun sebelumnya. Terdapat kendala dalam pengumpulan data di tahun 2020, karena sumber data sekunder yang masih terbatas pada tahun tersebut.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian adalah data primer melalui interview dan data sekunder melalui website, laporan atau *report* serta artikel ilmiah. Data yang dicari peneliti yaitu, isu *mental health* remaja Indonesia mulai tahun 2020-2023 dan bagaimana implementasi UNICEF dalam menangani permasalahan tersebut.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisa data kualitatif adalah teknik pengumpulan setelah penulis

mengamati, melihat dan menganalisis suatu objek. Pada awalnya peneliti yang menggunakan tipe analisa data ini akan berada pada tahap orientasi, dimana peneliti hanya mampu mendeskripsikan objek yang telah dilihat, dirasakan dan ditanyakan. Selanjutnya peneliti akan berada pada tahap reduksi data yang telah ditemukan agar dapat fokus dengan satu masalah. Tahap terakhir adalah seleksi dimana penulis harus melakukan pendalaman analisis terhadap informasi dan data yang ditemukan (Sugiyono, 2018).

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

BAB I yang memaparkan latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan menjelaskan implementasi *monitoring* UNICEF dalam menangani *mental health* remaja di Indonesia tahun 2020-2023.

Bab III akan menjelaskan implementasi *capacity building* dan *problem solving* UNICEF dalam menangani *mental health* remaja di Indonesia tahun 2020-2023

Bab IV akan berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.